

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sangatlah penting dalam menjelaskan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara dianggap berhasil jika terdapat tiga nilai utama berikut: yaitu, peningkatan harga diri masyarakat, kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Haryono dan Isral (2011), penguatan ketahanan pangan diperlukan dalam pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dan juga pemerintah mengsosialisasikan kepada masyarakat tentang pemahaman dan penafsiran bahwa ketahanan pangan itu penting.

Hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang mendasari diundangkannya UU No. 7 Juli 1996, tentang Pangan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketika tersedianya pangan lebih rendah dari permintaan, hal ini menyebabkan adanya ketidakstabilan ekonomi. Gangguan terhadap ketahanan pangan juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik. Terbaru dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan yang berisi "Ketahanan pangan adalah kondisi dimana keadaan tercukupinya pangan bagi mulai dari negara sampai kepada perseorangan, yang tergambar dari tercukupinya persediaan pangan, baik itu dari segi jumlah maupun mutu, beragam, hingga merata, dan terjangkau serta tidak berlawanan dengan agama dan budaya dalam masyarakat, supaya bisa hidup sehat dan produktif dengan berkelanjutan".

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial untuk kelangsungan hidup. Definisi pangan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum dan ilmu gizi. Secara hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) mendefinisikan pangan sebagai:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik itu diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan dan bahan baku lainnya yang dapat digunakan pada proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”. (UU Pangan No. 18 Tahun 2012, Pasal 1)

Definisi ini menekankan aspek asal-usul (sumber daya hayati dan air), pengolahan (diolah atau tidak diolah), dan tujuan penggunaan (makanan atau minuman) dari pangan. Dari sudut pandang ilmu gizi, pangan didefinisikan sebagai semua bahan yang dapat dijadikan makanan. (Almatsier, 2001). Definisi ini lebih fokus pada fungsionalitas dan manfaat pangan bagi manusia, yaitu sebagai sumber energi dan zat gizi untuk tubuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi pangan sebagai makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang. Definisi ini menekankan aspek kebutuhan dan hak manusia atas pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi tercukupinya kebutuhan pangan bagi individu, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara sistematis dan melibatkan upaya antar sektoral. Pendekatan ini bertujuan untuk: Mencapai kecukupan persediaan pangan melalui produksi dan perdagangan pangan dalam negeri; Mewujudkan stabilitas ketersediaan dan akses pangan pada tingkat makro dan mikro; Mencukupi kualitas makanan dan konsumsi makanan yang didukung oleh peningkatan infrastruktur. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan makro ekonomi yang dapat mencapai stabilitas perekonomian serta jaminan stabilitas stok pangan dan harga (Badan Pangan, 2021).

Terdapat berbagai studi empiris yang membahas terkait ketahanan pangan dan apa saja yang mempengaruhinya. Salah satu studi tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Widada dkk (2017) Penelitian ini meneliti faktor apa yang menentukan ketahanan pangan di Indonesia menerapkan model logistik biner dan menggunakan panel data dari seluruh provinsi dari tahun 2007 sampai 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa ketahanan pangan ditentukan secara signifikan oleh luasan lahan, produksi jumlah padi, produksi jumlah jagung, produksi jumlah kedelai,

produksi jumlah daging ayam dan sapi, kerapatan populasi serta FIMI (Food Security Multidimensional Index).

Ketahanan pangan juga berhubungan dengan jumlah penduduk suatu negara. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, semakin sulit bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Lebih spesifiknya, terdapat teori yang cukup terkenal mengenai hubungan ketersediaan pangan dengan pertumbuhan penduduk, yaitu teori Malthus. Malthus mengemukakan postulatnya yang terkenal “*Unchecked population increases in geometrical ration while subsistence increases in an aritmetical ratio*”. Jika dijabarkan dengan angka, maka dalam teorinya Malthus akan memproyeksikan pertumbuhan penduduk 3, 6, 12, 24, 48, 96 dan seterusnya, sedangkan produksi makanan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya (Agrawal, 2020).

Selanjutnya, Sakanko and David (2018) melakukan penelitian dengan menguji teori Malthus di Nigeria dan hasilnya menunjukkan prediksi teori Malthus ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Nigeria, yang menempatkannya sebagai negara paling padat penduduk di Afrika dan divergensi perhatian ekonomi dari pertanian mengharuskan validasi empiris dari teori Malthus di Nigeria. Studi ini menggunakan tes ARDL terikat dan hasilnya menunjukkan adanya kointegrasi diantara variabel dalam model. Pertumbuhan populasi dan produksi pangan memiliki sebuah hubungan positif dalam jangka panjang sambil menunjukkan hubungan terbalik dalam jangka pendek.

Berdasarkan data dari Economic Impact, skor Ketahanan Pangan Global atau *Global Food Security Index (GFSI)* Indonesia yakni sebesar 60,2 poin pada tahun 2022. Skor GFSI Indonesia meningkat 1,7% dibandingkan tahun 2021 mencapai 59,2 poin. Sedangkan secara trend, dari tahun 2012 sampai 2022 skor GFSI Indonesia naik dari 52,5 ke 60,2 di tahun 2023 dengan skor tertinggi di tahun 2018 dengan nilai 62,4 poin. Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) adalah sumber intelijen unggulan pada pengemudi ketahanan pangan global. Dikembangkan oleh Economist Impact dan didukung oleh Corteva Agriscience, yang mengevaluasi ketahanan pangan di 113 negara di seluruh dunia. Dengan empat pilar utama: keterjangkauan, ketersediaan, kualitas serta keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi. Indeks didasarkan pada

model perbandingan dinamis dibangun dari 68 penggerak kualitatif dan kuantitatif ketahanan pangan.

Sedangkan di Indonesia sendiri perhitungan mengenai ketahanan pangan dibuat oleh badan pangan nasional di bawah kementerian pertanian. Yaitu dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang telah terangkum dalam peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA). Penilaian IKP juga kurang lebih seperti GFSI dimana penilaian berdasarkan kepada 3 aspek, yakni aspek tersedianya pangan, terjangkaunya pangan dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan data IKP Provinsi 2022, lima provinsi mempunyai skor paling baik adalah Bali dengan skor (85,19), Jawa Tengah dengan skor (82,95), Sulawesi Selatan dengan skor (81,38), Kalimantan Selatan dengan skor (81,05) dan DI Yogyakarta dengan skor (80,88). Sedangkan lima provinsi mempunyai skor paling rendah, yaitu Papua dengan skor (37,80), Papua Barat dengan skor (45,92), Maluku Utara dengan skor (58,39), Maluku dengan skor (60,20), dan Kepulauan Riau dengan skor (63,83). Dan juga dalam tujuan nomor dua SDGs/ *Sustainable Development Goals Indonesia 2030* yaitu *No Hunger*, yakni untuk menghilangkan kelaparan, tercapainya ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi dan mendorong pertanian yang sustainable. Tujuan tersebut beriringan dengan pembangunan prioritas di Indonesia, mencakup ketahanan pangan dan cipta lapangan pekerjaan.

Dan jika dilihat dari data IKP provinsi tahun 2022, terdapat dua provinsi (5,88%), Papua dan Papua Barat yang termasuk IKP terendah dengan skor masing-masing 37,80 dan 45,92. Secara umum, nilai IKP Indonesia bagian timur lebih rendah dibanding Indonesia bagian barat. Penyebab buruknya nilai IKP antara lain seperti produksi pangan lokal lebih rendah dari permintaan, tingginya prevalensi bayi stunting, terbatasnya akses terhadap air bersih, dan banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Pengelolaan bahaya pangan secara komprehensif di wilayah-wilayah ini harus diprioritaskan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya.

Di sisi lain, persentase yang disumbangkan sektor pertanian terhadap PDB Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya

pergeseran perekonomian Indonesia dari pertanian menuju industri. Berdasarkan data BPS tahun 2022, sektor industri menyumbang kontribusi tertinggi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, bukan pertanian. Sektor industri memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 19,66%. Sektor pertanian menempati urutan kedua dengan 13,53%. Bahkan sektor pertanian sedikit tersalip oleh perdagangan besar dan kecil serta reparasi mobil dan motor dengan kontribusi sebesar 13,02%.

Sejalan dengan peningkatan produksi pangan, bahwa dari beberapa tahun terakhir pertumbuhan penduduk Indonesia juga mengalami peningkatan dan belum ada tanda akan terjadinya penurunan. Menurut Suartha (2016), banyak sekali faktor yang diduga menjadi pemicu tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertama, terdapat persepsi yang berkembang di masyarakat Indonesia yaitu jika banyak anak, maka akan banyak rezeki. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kesuburan Indonesia sebesar 2,38% pada tahun 2017. Kedua, banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia dengan tingkat 15% pada tahun 2018. Ketiga, program Keluarga Berencana (KB) yang belum maksimal. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, ketimpangan distribusi penduduk antar pulau juga menjadi permasalahan.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus Penduduk (SUPAS) tahun 2015, ketiga provinsi di Pulau Jawa menyumbang sekitar 46% penduduk Indonesia. Masalah logistik muncul ketika populasi dan konsentrasi pangan tidak seimbang. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan melonjaknya harga pangan, memperburuk ketahanan pangan nasional, dan pada akhirnya menimbulkan ketimpangan kesejahteraan daerah. (Widya, 2019). Berdasarkan dari permasalahan diatas maka dari itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor empat di dunia cukup menarik untuk diteliti lebih dalam terkait ketahanan pangannya. Maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ketahanan Pangan Di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang disusun peneliti berdasarkan latar belakang diatas dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketahanan pangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap ketahanan pangan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh produksi beras terhadap ketahanan pangan di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh produksi beras terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan.

2. Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa. Penelitian ini juga dapat melengkapi penelitian yang telah ada mengenai dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

### 3. Manfaat bagi penulis

Pelitiaan ini merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan.

